

<p><b>Pelindung</b> Jafet Damamain</p> <p><b>Penanggung Jawab</b> Mozes Tomasila</p> <p><b>Pemimpin Umum</b> <i>Pieter Leunupun</i></p> <p><b>Pemimpin Redaksi</b> Simon Pieter Soegijono</p> <p><b>Wakil Pemimpin Redaksi</b> Stanley Salenus</p> <p><b>Reviewer</b> (Universitas Kristen Satya Wacana) Marcus Jacob Papilaja (Universitas Pelita Harapan Ambon) Ruslan Tawary (Universitas Pattimura Ambon) Wilson Therik (Universitas Nusa Cendana) Vincent Hadiwiyono (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta)</p> <p><b>Editor</b> Paulus Rikumahu Salomin J. Hehanussa Sarlothia Y. Purimahua Jolyne Myrell Parera Thomas Aurima Steve Gaspers Desianus Leunupun John Pelamonia</p> <p><b>Administrasi</b> Anti Ismail Grace Persulesy</p> <p><b>Alamat Penerbit</b> Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKIM Ambon Jalan OT Pattimaipauw – Talake Ambon Telepon +62911343773 <b>Email</b> : pieter.leu@yahoo.com</p> <p><b>www://ojs.ukim.ac.id</b></p> <p>Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKIM – Ambon, 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Maret dan Oktober</p>
--

## Daftar Isi

Analisis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Terhadap Kapasitas Ekonomi UMKM di Kota Ambon <i>Debora Maria Pattiwael, Jondry Adrin Hetharie, Micrets A. Silaya</i>	84 – 91
Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan <i>Yohana Melayaman, Pieter Leunupun, Gino G. Manuputty, Gwenn L. L. Pattinama</i>	92 - 112
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian <i>Finsandra Wonatorei, Pieter Leunupun, Noline Hiariej</i>	113 – 130
Pengaruh Lingkungan Kerja Dalam Hubungannya Dengan Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Sorong Barat Kota Sorong <i>Joseph Eliza Lopulalan, Roberthair Suripatty, Reka Rumadat Sitorus</i>	131 – 142
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan <i>Jeannefer Vicaria Hehanussa, Gino G. Manuputty, Noline Hiariej</i>	143 – 166
Sistim Pengatur Aliran Bahan Bakar ( <i>Governor</i> ) Pada Motor Disel <i>Ferdinand Johan Wattimury</i>	167 - 180

## **ANALISIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) TERHADAP KAPASITAS EKONOMI UMKM DI KOTA AMBON**

**Debora Maria Pattiwael, Jondry Adrin Hetharie, Micrets A. Silaya**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Maluku

### ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the role of the distribution of People's Business Credit and Ultra Micro Financing in enhancing the economic capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Ambon City. The study employs a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and documentation techniques involving MSME actors and relevant stakeholders. The results indicate that KUR and UMi contribute positively to increasing business capital, business sustainability, and opportunities for business scale development. Nevertheless, the effectiveness of these financing schemes still faces several constraints, including limited financial literacy, inadequate mentoring, and local market conditions. This study underscores the importance of integrating financing and mentoring within MSME development policies, particularly in archipelagic regions.*

**Keywords:** *People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR), Ultra Micro Financing (Pembiayaan Ultra Mikro/UMi), Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), economic capacity, Ambon City*

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi rakyat dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto serta penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional telah mencapai lebih dari 60 persen, sementara daya serap tenaga kerja mendekati seluruh tenaga kerja sektor swasta. Ketahanan UMKM juga terbukti saat krisis ekonomi 1997–1998, sekaligus berperan dalam pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Meskipun berperan besar, UMKM masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan akses permodalan. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai skema pembiayaan, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mulai dijalankan sejak 2007 melalui perbankan dengan dukungan penjaminan dan

subsidi bunga (Harefa, 2015). Seiring perkembangan kebijakan, pemerintah juga memperkenalkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro lapis terbawah yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan. UMi dirancang sebagai jembatan antara bantuan sosial dan KUR, dengan mekanisme yang lebih sederhana dan disertai pendampingan.

Namun, studi empiris yang mengkaji efektivitas penyaluran KUR dan UMi secara simultan, khususnya pada tingkat daerah, masih relatif terbatas. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menekankan peran KUR terhadap kinerja atau pendapatan UMKM, sementara kajian mengenai UMi dan kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro belum banyak dilakukan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kota Ambon. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan riset terkait evaluasi kebijakan pembiayaan mikro yang kontekstual dan berbasis wilayah.

Kajian mengenai penyaluran KUR dan UMi menjadi penting secara ilmiah maupun praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kebijakan pembiayaan mikro dan dampaknya terhadap penguatan kapasitas ekonomi UMKM. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas program pemerintah dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi, khususnya bagi UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan modal dan pendampingan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap peningkatan kapasitas ekonomi UMKM di Kota Ambon serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha. Artikel ini berkontribusi dengan menghadirkan bukti empiris berbasis konteks lokal mengenai peran pembiayaan pemerintah dalam memperkuat UMKM, sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi pengembangan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipahami sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan berperan penting dalam struktur perekonomian nasional. Secara konseptual, UMKM berfungsi sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada masa krisis (Tambunan, 2013; Suci, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kerangka ini menegaskan bahwa UMKM tidak hanya dilihat dari skala usaha, tetapi juga dari kapasitas ekonomi dan keberlanjutan usahanya.

Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi, UMKM diposisikan sebagai instrumen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. *Middle-range theory* yang relevan adalah teori akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi, yang menekankan bahwa keterbatasan modal menjadi hambatan utama pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Kredit program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar kredit dengan menyediakan pembiayaan bagi usaha yang layak namun belum bankable (Widiastuti, 2017). KUR merupakan skema pembiayaan modal kerja dan investasi yang disalurkan melalui perbankan dengan dukungan subsidi bunga dan penjaminan pemerintah, sehingga menurunkan risiko kredit bagi lembaga penyalur.

Selain KUR, pemerintah mengembangkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai perluasan intervensi kebijakan bagi pelaku usaha mikro lapis terbawah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018, UMi merupakan fasilitas pembiayaan yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank kepada pelaku usaha yang belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Karakteristik utama UMi adalah proses yang sederhana, plafon pembiayaan relatif kecil, serta kewajiban pendampingan usaha. Secara konseptual, UMi berfungsi sebagai jembatan antara bantuan sosial dan pembiayaan formal, dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendorong wirausaha baru.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran pembiayaan pemerintah terhadap kinerja dan kesejahteraan UMKM. Made Ary Mayuni dan Rustariyuni (2015) menggunakan metode kualitatif melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, dan menemukan bahwa KUR berperan positif dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana. Ade Muhamad (2015) juga dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibeureum. Roza Gustika (2016) melalui metode deskriptif kualitatif membuktikan bahwa pemberian KUR berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pemilik usaha kecil di Kabupaten Pasaman. Adnan Husada Putra (2016) menekankan peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora, sementara Yuli Rahmini Suci (2016) menunjukkan bahwa pengembangan UMKM berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa akses pembiayaan dan penguatan UMKM memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada KUR sebagai satu-satunya instrumen pembiayaan, dengan lokasi penelitian yang didominasi wilayah daratan dan sektor tertentu. Kajian mengenai Pembiayaan Ultra Mikro masih relatif terbatas, terutama yang

menganalisis perannya secara bersamaan dengan KUR dalam meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM. Selain itu, konteks wilayah kepulauan seperti Kota Ambon belum banyak dikaji, padahal karakteristik geografis dan struktur ekonomi lokal berpotensi memengaruhi efektivitas penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berkontribusi dalam melengkapi kekurangan riset sebelumnya dengan mengkaji secara terpadu penyaluran KUR dan UMi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi UMKM di Kota Ambon. Artikel ini tidak hanya memperkaya kajian empiris mengenai pembiayaan mikro berbasis kebijakan publik, tetapi juga memberikan perspektif kontekstual mengenai efektivitas program pemerintah di wilayah kepulauan, sehingga relevan bagi pengembangan teori dan perumusan kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif untuk memahami secara mendalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta implikasinya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi UMKM. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, persepsi, dan pengalaman pelaku usaha serta pemangku kepentingan terhadap kebijakan pembiayaan pemerintah dalam konteks sosial yang nyata (Moleong, 2017; Sugiyono, 2018; Hendryadi et al., 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan objek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima pembiayaan KUR dan UMi. Pengumpulan data dilakukan pada periode November hingga Desember 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah kepulauan dan meningkatnya peran pembiayaan pemerintah dalam mendukung UMKM di daerah tersebut.

Dalam penelitian kualitatif ini, konsep populasi dan sampel tidak digunakan secara statistik. Subjek penelitian ditetapkan sebagai informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitannya dengan program pembiayaan KUR dan UMi (Arikunto, 2016). Informan kunci terdiri atas staf Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku yang berperan dalam pembinaan dan pendampingan UMKM. Informan pendukung meliputi lima pelaku UMKM di Kota Ambon yang menerima atau tidak menerima pembiayaan KUR dan UMi. Penentuan jumlah informan dilakukan hingga mencapai kecukupan informasi dan kejenuhan data.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri, dengan dukungan pedoman wawancara, kuesioner, dan lembar observasi. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman dan persepsi

informan terhadap penyaluran KUR dan UMi (Arikunto, 2016; Yusuf, 2014). Kuesioner digunakan untuk menggali persepsi pelaku UMKM terkait dampak pembiayaan terhadap kapasitas ekonomi usaha, sementara dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data berupa laporan, catatan, dan arsip pendukung. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Proses analisis berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data hingga data mencapai kejenuhan. Analisis difokuskan pada identifikasi pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran KUR dan UMi dalam meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM di Kota Ambon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Ambon. Sebagian besar informan penerima KUR dan UMi menyatakan adanya peningkatan modal usaha, kelancaran arus kas, serta kemampuan mempertahankan dan mengembangkan usaha. Penerima KUR umumnya memanfaatkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi usaha, sedangkan penerima UMi lebih banyak menggunakan dana untuk kebutuhan usaha berskala mikro dengan proses yang relatif sederhana dan cepat.

Temuan juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang tidak menerima pembiayaan KUR maupun UMi tetap mengalami peningkatan kapasitas ekonomi, namun dalam skala yang lebih terbatas. Peningkatan tersebut umumnya berasal dari pengalaman usaha, jaringan sosial, dan strategi pengelolaan usaha secara mandiri. Dibandingkan dengan penerima pembiayaan, kelompok ini menghadapi keterbatasan dalam memperluas usaha dan meningkatkan volume produksi.

Selain dampak positif, penelitian menemukan beberapa kendala utama dalam penyaluran KUR dan UMi. Kendala tersebut meliputi keterbatasan literasi keuangan, pemahaman administrasi pembiayaan, ketergantungan pada pendamping, serta faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku dan kondisi pasar lokal. Kendala nonpembiayaan ini berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan dana dan keberlanjutan usaha UMKM.

## **KESIMPULAN**

Temuan penelitian ini menguatkan teori akses pembiayaan yang menyatakan bahwa keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan utama pertumbuhan

UMKM. Penyaluran KUR dan UMi berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengatasi kegagalan pasar kredit, khususnya bagi pelaku usaha yang layak secara ekonomi tetapi memiliki keterbatasan akses perbankan (Sugiyono, 2018; Moleong, 2017). Dalam konteks ini, KUR dan UMi tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Made Ary Mayuni dan Rustariyuni (2015) serta Roza Gustika (2016) yang menunjukkan bahwa KUR berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan UMKM. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa UMi juga berkontribusi nyata bagi pelaku usaha mikro lapis terbawah, terutama melalui kemudahan persyaratan dan adanya pendampingan. Hal ini mengonfirmasi bahwa UMi berfungsi sebagai jembatan antara bantuan sosial dan pembiayaan formal, sebagaimana dirancang dalam kebijakan pemerintah (PMK No. 95/PMK.05/2018).

Peningkatan kapasitas ekonomi UMKM yang tidak menerima pembiayaan menunjukkan bahwa faktor nonfinansial seperti pengalaman, jejaring sosial, dan kemampuan adaptasi juga berperan dalam keberlanjutan usaha. Namun, keterbatasan modal menyebabkan pertumbuhan usaha kelompok ini cenderung lebih lambat. Temuan ini mendukung pandangan bahwa pembiayaan bukan satu-satunya faktor penentu, tetapi tetap menjadi faktor kunci dalam mempercepat skala dan daya saing UMKM (Suci, 2016; Tambunan, 2013).

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya aspek pendampingan dan literasi keuangan dalam penyaluran pembiayaan. Meskipun KUR dan UMi dirancang untuk mempermudah akses modal, keterbatasan pemahaman administrasi dan pengelolaan keuangan masih menjadi hambatan di tingkat pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan akan lebih optimal apabila disertai penguatan kapasitas manajerial dan pendampingan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kota Ambon dengan karakteristik ekonomi yang khas.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pembiayaan mikro dengan menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi antara akses modal dan pendampingan usaha. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan lembaga penyalur untuk memperkuat sinergi antara KUR dan UMi serta meningkatkan kualitas pendampingan agar pembiayaan benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi UMKM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods

dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menguji secara empiris hubungan antara pembiayaan, pendampingan, dan kinerja UMKM dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Damayanti, M., & Adam, L. (2015). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai alat pendorong pengembangan UMKM di Indonesia. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2019, October 31). Mengenal kredit program pemerintah (KUR atau UMi?). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021, January 18). Pembiayaan UMi (Ultra Mikro). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gustika, R. (2016). Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan masyarakat pemilik usaha kecil di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 4(2), 107–115.
- Hendryadi, Trichayadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode penelitian: Pedoman penelitian bisnis dan akademik*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Strategic brief sheet s.d. Desember 2024. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) semester I tahun 2024. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM semester I tahun 2024. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku.

- Mayuni, M. A., & Rustariyuni, S. D. (2015). Peranan Kredit Usaha Rakyat terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(12), 1437–1465.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, A. (2015). Peran usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 45–58.
- Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 12–23.
- Suci, Y. R. (2016). Perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 5(1), 1–12.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2013). *UMKM di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.

**PELUANG**, Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Maluku terbit dua nomor dalam setahun, pada bulan Maret dan Oktober. Redaksi mengundang para ilmuwan, peneliti, praktisi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pemikiran dan ide-ide ilmu pengetahuan di Jurnal ini.

Tulisan yang dimuat tidak selalu sepaham dengan pemikiran dan atau mewakili pemikiran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Maluku. Redaksi dapat melakukan perbaikan terhadap tulisan yang disetujui untuk diterbitkan.

## PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Peluang menerima berbagai naskah hasil penelitian empiris maupun teoritis di bidang Ilmu-Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi yang belum pernah dipublikasikan.
2. Naskah diketik dengan *Microsoft Word*, huruf *Times New Romans* 12, spasi 1,15 dan 10-20 halaman. Naskah dikirim ke alamat Redaksi sebanyak satu eksemplar dengan menyerahkan *soft copy*.
3. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:

### A. Artikel Hasil Penelitian

- **Judul, nama penulis** (tanpa gelar akademik), **tempat kerja**, dan **alamat email**.
- **Abstrak** dalam bahasa Inggris (maksimal 100 kata), kata-kata kunci maksimal empat kata.
- **Pendahuluan (tanpa sub judul)**. Berisi permasalahan penelitian, tujuan penelitian,
- **Tinjauan Pustaka**. Berisi rangkuman kajian teoritik berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- **Metode Penelitian**. Bagian ini memuat rancangan penelitian atau desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.
- **Hasil**. Bagian ini menampilkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
- **Pembahasan**. Memuat kupasan temuan-temuan dan interpretasinya, argumentasi dan pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas.
- **Kesimpulan dan Saran**. Menyajikan kesimpulan dan saran yang mengacu pada hasil penelitian.

### B. Artikel Konseptual

- **Judul, nama penulis** (tanpa gelar akademik), **tempat kerja** dan **alamat email**.
- **Abstrak** dalam bahasa Inggris (maksimal 100 kata), kata-kata kunci maksimal empat kata.
- **Pendahuluan (tanpa sub judul)**. Menguraikan hal-hal yang menarik perhatian pembaca dan memberikan konteks bagi permasalahan yang dibahas, mengemukakan permasalahan yang dibahas dan tujuan pembahasan.
- **Pembahasan**. Bagian ini berisi kupasan permasalahan yang meliputi analisis, argumentasi atau komparasi dan pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas.
- **Kesimpulan**. Berisi penegasan sikap penulis atas masalah yang dibahas, termasuk saran-saran dan sikap alternatif jika ada.

4. Daftar pustaka disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Radianto, E. (2003), *Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusakan di Maluku, Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 52 No.4, hlm.306-321.

Gujarati dan Damodar N, (2003), *Basic Econometrics*, Fourth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc.

5. Naskah dalam bahasa Indonesia harus mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia baku. Jika ada penggunaan istilah asing harus membuat penjelasannya.
6. Naskah yang sudah dipaparkan harus dibuat keterangan terhadap waktu dan tempat pemaparan.
7. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahukan secara tertulis.
8. Naskah artikel yang tidak dimuat, tidak akan dikembalikan.